

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

PENGUATAN PERAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DI KOTA DUMAI DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Rendi Prayuda, Saiman Pakpahan

Department of International Relations
Faculty of Social Science and Political Science
University of Riau

Campus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km 12.5 Simp. New Pekanbaru
Phone Fax 0761-63277

Abstrack

Asean economic community are one of main purpose economic integrations that vision of Asean Community in 2020. In order that covergency interest of the Asean members are open economic, out orientations and economic integration. Based on Asean blue print that was adopted by Asean members in South east Asia was transformations to market and basics productions. In order that needed efforts from Government of Dumai City to increase the coperation as a economic society in Dumai City.

The research use the methode are qualitative methods that analyze problem research by describe the subject and object conditions based on real fact. This research use location in Dumai City and researcher collect data from books, government regulation, jurnal, mass media, website and deep interview with informan likes Head Agency of Coperation, micro small and middle Dumai City, Head of Coperation Dumai City and staff of coperation in Dumai City.

The conclusion of this research are increase of optimalization coperations rule in Dumai City toward Asean Economic Community have done by somes activity likes controlling, advices coperations, evaluating of coperations, and supervising of staff of coperation in Dumai City and agency of Coperation, micro small and middle Dumai City also have done micro small and middle growth in Dumai City.

Keywords: rules, institutional, coperation and Dumai.

PENDAHULUAN

Penelitian ini merupakan sebuah kajian hubungan internasional yang menganalisis mengenai penguatan peran koperasi dan usaha kecil menengah di Kota Dumai dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang diawali dengan menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi berkaitan dengan kondisi pembangunan di wilayah perbatasan. Setelah itu akan dilanjutkan dengan menganalisa mengenai penguatan peran koperasi dan usaha kecil menengah di Kota Dumai dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean.

Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dan wawancara bersama informan penelitian. Pada metode ini, data- data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas merupakan data-data sekunder yang didapatkan dari buku-buku, majalah-majalah, jurnl, surat kabar, buletin, laporan tahunan dan sumber-sumber



lainnya. Peneliti juga menggunakan sarana internet dalam proses pengumpulan data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang akan dibahas.

Kerangka dasar pemikiran diperlukan oleh penulis untuk membantu dalam menetapkan tujuan dan arah sebuah penelitian serta memiliki konsep yang tepat untuk pembentukan hipotesa. Teori bukan merupakan pengetahuan yang sudah pasti tapi merupakan petunjuk membuat sebuah hipotesis. Dalam melakukan penelitian ini, dibutuhkan adanya kerangka pemikiran yang menjadi pedoman peneliti dalam menemukan, menggambarkan dan menjelaskan objek penelitian sekaligus menjadi *frame* bagi peneliti.

Koperasi merupakan bagian dari tata susunan ekonomi, hal ini berarti bahwa dalam kegiatannya Koperasi turut mengambil bagian bagi tercapainya kehidupan ekonomi yang sejahtera, baik bagi orang-orang yang menjadi anggota perkumpulan itu sendiri maupun untuk masyarakat di sekitarnya. Koperasi sebagai perkumpulan untuk kesejahteraan bersama, melakukan usaha dan kegiatan di bidang pemenuhan kebutuhan bersama dari para anggotanya. Koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Dalam rangka usaha untuk memajukan kedudukan rakyat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas tersebut, maka Pemerintah Indonesia memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan perkumpulan-perkumpulan Koperasi. Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan landasan bagi penyusunan dan pengelolaan ekonominasional dalam rangka memberikan kesejahteraan kepada rakyat banyak dengan asas demokrasi ekonomi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.

Dalam arti yang lebih luas, dirumuskan pada ayat 4 Pasal tersebut di atas, bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Koperasi yang sering disebut sebagai sokoguru ekonomi kerakyatan ini, batasannya dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi Pasal 1 ayat 1 sebagai berikut: Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip ekonomi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dari Pasal ini dapat dipastikan bahwa:

1. Koperasi adalah badan usaha bukan Ormas;
2. Pendiri/ pemiliknya adalah orang-orang (perorangan/ individu) atau badan hukum Koperasi;
3. Bekerja berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi dan asas kekeluargaan; Sebagai gerakan ekonomi rakyat.

Kebijakan menurut S. A Wahab berdasarkan pendapat Friedrich, yaitu suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu seraya mencari peluang-



peluang untuk tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.¹ Thomas R. Dye,² mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat kehidupan bersama tampil berbeda. Kemudian Harold Laswell³ juga memberikan pengertian kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu dan praktik-praktik tertentu. David Easton secara singkat memberikan definisi kebijakan publik sebagai *impact* dari aktivitas pemerintah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kota Dumai terletak di Propinsi Riau, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999 tentang Pembentukan Kabupaten/Kota Baru di Provinsi Riau sebagai pengejawantahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pada awal terbentuknya Kota Dumai meliputi 3 (tiga) Kecamatan, yaitu Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Timur dan Kecamatan Bukit Kapur. Kemudian menjadi (lima) Kecamatan dengan bertambahnya dua Kecamatan sesuai Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 18 Tahun 2001 tentang pembentukan Kecamatan Sungai Sembilan dan Kecamatan Medang Kampai.⁴

Tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat juga telah memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat di Kota Dumai sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Selain itu Kawasan Dumai sangat strategis untuk dijadikan kawasan pengembangan perdagangan internasional, karena Dumai berada di kawasan lintas perdagangan internasional Selat Melaka. Sejak beberapa tahun Kotamadya Dumai telah mengajukan usulan sebagai kawasan perdagangan bebas/*Free Trade Zone*. Pemerintah RI sedang menyempurnakan produk hukum yang disebut UU kawasan FTZ.

Secara operasional, integrasi ekonomi ASEAN dapat didefinisikan sebagai pencabutan diskriminasi dan penyatuan politik (kebijakan) seperti norma, peraturan, serta prosedur. Instrumen integrasi ekonomi ASEAN meliputi bea masuk, pajak, mata uang, undang-undang, lembaga, standarisasi, dan kebijaksanaan ekonomi.⁵ Tujuan integrasi ekonomi ASEAN adalah untuk meningkatkan volume perdagangan barang dan jasa, meningkatkan mobilitas modal dan tenaga kerja, meningkatkan produksi, meningkatkan efisiensi produksi serta meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan.

Dengan dijadikannya Kota Dumai sebagai daerah otonom pemerintah daerah Kota Dumai mencakup seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, yuridis,

1. S.A Wahab, 1997, *Analisa Kebijakan Negara dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara: Jakarta Hlm 3

2. Thomas R. Dye, 1978, *Understanding Public Policy*, Prentice Hall, Inc. Englewood Cliffs, NJ.

3. Harold D. Laswell, 1971, *A Preview of Policy Sciences*, American Elsevier, New York.

4. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 18 Tahun 2001 tentang pembentukan Kecamatan Sungai Sembilan dan Kecamatan Medang Kampai

5. Integrasi Ekonomi ASEAN 2015, <https://www.academia.edu/9503310/> (diakses tanggal 25 Juli 2015)



moneter dan fiskal nasional, agama, serta kewenangan dibidang lain seperti kebijakan perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan di sumber daya manusia, penguasaan SDM dan SDA serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional. Salah satu isu yang hangat dibicarakan saat ini adalah mengenai implementasi Masyarakat Ekonomi Asean.

Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN ini dilatarbelakangi oleh persiapan menghadapi globalisasi ekonomi dan perdagangan melalui ASEAN Free Trade Area (AFTA) serta menghadapi persaingan global terutama dari China dan India. Percepatan keputusan negara ASEAN untuk membentuk MEA yang pada awalnya akan dimulai pada tahun 2020 menjadi 2015 menggambarkan tekad ASEAN untuk segera meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing antar sesama negara anggota ASEAN untuk menghadapi persaingan global.

Salah satu cara dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Dumai dalam menghadapi masyarakat ekonomi Asean adalah dengan menguatkan peran koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kota Dumai. Adapun beberapa langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Dumai adalah sebagai berikut:

Pemerintah Kota Dumai Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Koperasi di Kota Dumai

Sejak tahun 2011, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Dumai secara aktif melakukan pembinaan dan sosialisasi pelaksanaan rapat anggota tahunan koperasi di Kota Dumai. Menurut Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kota Dumai, bahwa:

"Pengembangan kelembagaan koperasi di Kota Dumai dilakukan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Dumai. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Dumai adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (Wawancara penulis dengan Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Dumai tanggal 12 Mei 2017).

Secara umum perkembangan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah di Kota Dumai adalah sebagai berikut, pada tahun 2014 terdapat 201 Koperasi di Kota Dumai dan yang tidak aktif terdapat sekitar 40 koperasi. Dan pada tahun 2015 terdapat 277 koperasi di Kota Dumai dan yang tidak aktif terdapat sekitar 44 koperasi dan selanjutnya pada tahun 2016 terdapat 277 dan terdapat sekitar 49 koperasi yang tidak aktif.

Kegiatan sosialisasi pentingnya koperasi untuk diaktikan kembali selalu dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Dumai untuk dapat meningkatkan peran koperasi secara optimal. Selain itu, upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Dumai



adalah melakukan kegiatan melakukan pembinaan terhadap pengurus, pengawas dan manajer serta karyawan koperasi di Kota Dumai. Pada tahun 2014, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis melakukan pembinaan anggota koperasi untuk peran serta aktif dalam koperasi di Kota Dumai.

Selain itu, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Dumai juga melakukan pembinaan terhadap administrasi umum dan administrasi keuangan. Sehingga dengan adanya pembinaan terhadap pengurus anggota dan manajer serta karyawan koperasi oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Dumai maka hal ini diharapkan dapat memberikan kesadaran pentingnya koperasi kepada masyarakat di Kota Dumai dalam menghadapi masyarakat Ekonomi Asean. Menurut Kepala Seksi Penyuluhan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Dumai, bahwa:

Di dalam optimalisasi peran koperasi di Kota Dumai ini maka unsur komunikasi ini tidak lepas dari penguatan organisasi. Komunikasi dilakukan tidak hanya dengan pihak eksternal saja yaitu anggota akan tetapi penting untuk komunikasi dengan pihak internal yang meliputi Rapat Pengurus, Pengawas, Manajer, PPL, Karyawan”(Kepala Seksi Penyuluhan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Dumai tanggal 14 Mei 2017).

2. Pemerintah Kota Dumai Melakukan Kegiatan Evaluasi terhadap Koperasi

Upaya lainnya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Dumai adalah melakukan kegiatan evaluasi terhadap koperasi yang ada di Kota Dumai. Sejauh pengamatan penulis di lapangan, menunjukkan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Dumai telah melakukan perannya sebagai organisasi yang berupaya melaksanakan dan mengikuti serta menerapkan hasil dari pelatihan/pendidikan yang diadakan oleh koperasi sendiri maupun dinas atau lembaga lainnya. Kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Dumai adalah melakukan pendataan kembali terhadap koperasi yang ada di Kota Dumai. Berikut ini merupakan kegiatan evaluasi pendataan jumlah koperasi yang ada di Kota Dumai, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.3 Keragaan Koperasi di Kota Dumai tahun 2014-2016

Kecamatan	Tahun					
	2014		2015		2016	
	Aktif	Tidak Aktif	Aktif	Tidak Aktif	Aktif	Tidak Aktif
Dumai Timur	49	7	40	17	43	16
Dumai Barat	23	7	16	14	17	14
Bukit Kapur	19	3	12	13	12	13
Sungai Sembilan	32	6	26	14	18	22
Medang Kampai	12	5	5	12	7	11
Dumai Kota	39	10	40	16	45	15



7	Dumai Selatan	27	2	24	8	29	8
Total		201	40	163	94	171	99

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Dumai

Berdasarkan data tabel diatas, maka kegiatan evaluasi terhadap koperasi di Kecamatan Bengkalis ini dilakukan setiap tahunnya oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Dumai untuk dapat mengembangkan peran koperasi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kecamatan Bengkalis.

1. Pemerintah Kota Dumai Melakukan Kegiatan Pelatihan Pengurus Koperasi

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Dumai melalui Bidang bina usaha koperasi adalah dengan melakukan kegiatan pemantapan kelembagaan dan usaha koperasi. Menurut Kepala Bidang Bina Usaha Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Dumai, bahwa:

Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah pengembangan kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu, perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Jadi, manusia adalah salah satu faktor paling penting untuk mendukung maju dan berkembangnya suatu organisasi. Pengembangan kapasitas melalui SDM pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis sejauh ini sudah ada pengembangan, yaitu: melalui upaya pelatihan/diklat, seminar, workshop dan sebagainya pada pengurus, pengawas, dan karyawan. Pelatihan tersebut bertujuan untuk menambah wawasan, pengalaman serta meningkatkan keterampilan dan potensi yang dimiliki oleh pengurus, pengawas, dan karyawan, agar kedepannya nanti kegiatan tersebut bisa bermanfaat untuk kemajuan koperasi (Wawancara penulis dengan Kepala Bidang Bina Usaha Koperasi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Dumai tanggal 15 mei 2017).

Selain itu, menurut Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Dumai bahwa:

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Dumai dalam optimalisasi peran koperasi di Kecamatan Bengkalis adalah melakukan penguatan dan pemantapan organisasi pada koperasi di Kota Dumai. Beberapa upaya ini meliputi komunikasi, gaji/bonus untuk karyawan yang semuanya terkandung dalam sistem manajerial (Hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Dumai tanggal 12 Januari 2015).

Selain itu, perlu dicatat bahwa pengorganisasian adalah proses manajerial yang berkelanjutan. Sebagaimana kita ketahui kronologi selalu



berkembang, lingkungan organisasi dapat berubah, yang mana manajer harus menyesuaikan strategi yang telah disusunnya, sehingga tujuan dari organisasi tetap dapat dicapai secara efektif dan efisien. Beberapa kegiatan pemantapan koperasi tersebut berupa:

1. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Dumai melakukan penguatan modal usaha koperasi
2. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Dumai memberikan bantuan fisik sarana dan prasarana usaha koperasi di Kota Dumai.
3. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Dumai memfasilitasi kemitraan usaha koperasi dengan BUMN, BUMS dan dunia usaha lainnya.
4. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Dumai memfasilitasi akses kelembaga keuangan (perbankan).
5. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Dumai memfasilitasi pemasaran produk koperasi
6. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Dumai mengembangkan usaha koperasi yang berorientasi global dengan kompetensi dan produk keunggulan daerah.

Pemerintah Kota Dumai Melakukan Kegiatan Pemantapan Lembaga Koperasi

Dalam kegiatan pemantapan lembaga koperasi, maka Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Dumai selalu memberikan pelatihan dalam meningkatkan partisipasi memegang peranan yang penting dalam pembangunan dan perkembangan koperasi. Tanpa partisipasi anggota kemungkinan atas rendahnya efisiensi dan efektifitas koperasi akan lebih besar dan akan mempengaruhi kinerja koperasi. Menurut H. Umran selaku tokoh masyarakat di Kota Dumai, bahwa:

Dalam meningkatkan peran koperasi di Kota Dumai untuk mensejahterakan masyarakat disekitarnya sangat dibutuhkan kontribusi anggota terhadap kegiatan usaha koperasi dapat berbentuk kewajiban anggota dalam membayar harga atas pelayanan koperasi, kegiatan pendidikan, dan kehadiran dalam acara koperasi. Akan tetapi selain peran pengurus dan anggota koperasi maka peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Dumai juga sangat besar terutama dalam pengawasan terhadap kinerja koperasi di Kota Dumai (Hasil wawancara penulis dengan H. Umran Tokoh Masyarakat di Kota Dumai tanggal 2 Mei 2017).

Berdasarkan wawancara diatas, maka partisipasi anggota dalam Koperasi di Kota Dumai dapat dilihat dari bagaimana mereka berperan serta dalam masalah pembiayaan yang digunakan untuk pembangunan koperasi. Partisipasi bruto anggota sama dengan pendapatan koperasi yang diperoleh dari hasil usaha (penjualan) koperasi. Partisipasi neto ini adalah hasil usaha kotor



misalnya biaya distribusi dan transportasi, gaji dan upah, penyusutan, pemeliharaan aktiva tetap dan lain sebagainya.

1. Pemerintah Kota Dumai Mengembangkan Usaha Kecil Menengah Berbasis Ekonomi Kreatif

Sasaran kebijakan pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, yang berorientasi pada peningkatan pendapatan masyarakat terutama yang mempunyai keterbatasan ekonomi. Pemerintah Daerah bertekad untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia dengan berbagai cara penanggulangan kemiskinan sudah menjadi program vital pemerintah dalam menyusun dan melaksanakan rencana pembangunan. Hal ini dikarenakan kemiskinan terus menjadimasaalah fenomenal sepanjang sejarah Indonesia sebagai negara kesatuan.

Salah satu program perencanaan pembangunan partisipati adalah program program bantuan teknis (dalam rangka pemberdayaan) kepada masyarakat dan memberikan bantuan dalam bentuk stimulan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan ekonomi yang diusulkan oleh masyarakat yang sifatnya bergulir. Bentuk Program Pemberdayaan Desa (PPD) adalah UED-SP (Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam) atau UEK-SP (Usaha Ekonomi Kelurahan-Simpan Pinjam). UEK-SP merupakan lembaga pedesaan atau kelurahan yang bergerak di bidang keuangan untuk menunjang usaha ekonomi produktif di desa/kelurahan.

Program PPD tersebut memberi bantuan dalam bentuk stimulan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan ekonomi yang diusulkan oleh masyarakat yang sifatnya bergulir. Selanjutnya program ini disebut Usaha Ekonomi Desa / Kelurahan-Simpan Pinjam (UED/K-SP). Kota Dumai telah melaksanakan program UEK-SP sejak Tahun 2005 di 33 Kelurahan yang ada, dimana setiap Kelurahan memiliki 1 (satu) UEK-SP. Adapun sumber dana awal berasal dari budget sharing antara APBD Provinsi Riau dan APBD Kota Dumai.

Adapun seluruh kegiatan baik perorangan maupun kelompok merupakan prakarsa dari masyarakat sendiri untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan kegiatan meliputi :

1. Perdagangan; kios, warung pengumpul
2. Pertanian; tanaman pangan
3. Perkebunan; sawit, karet, kelapa
4. Peternakan; itik, ayam, sapi, kerbau, kambing
5. Perikanan; perikanan tangkap, tambak
6. Jasa : bengkel, salon, service, komputer dan hp
7. Industri rumah tangga; pembuatan minyak kelapa, gula aren, genteng, batu bata, pengolahan ikan, gerabah, anyaman

Perkembangan dana Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) di Kota Dumai mengalami peningkatan dari Rp16,5 Milyar meningkat menjadi Rp92,98 Milyar dengan jumlah pemanfaat sebanyak 11.332 orang. Program UEK-SP merupakan *budget sharing* antara Pemerintah Propinsi Riau dengan



Pemerintah Kota Dumai dengan cara menyalurkan dana bergulir Rp500 juta ke 33 Kelurahan di Kota Dumai.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penjelasan-penjelasan bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa penguatan peran koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN sangat penting dilakukan. Hal ini dikarenakan dengan disahkannya Masyarakat Ekonomi Asean maka akan menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai sebuah pasar tunggal dan basis produksi maka implementasi Masyarakat Ekonomi Asean dilakukan dalam lima bidang, yaitu, pergerakan bebas barang; pergerakan bebas jasa; pergerakan bebas investasi; pergerakan bebas modal; dan pergerakan bebas pekerja terampil. Oleh karena itu beberapa hal dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Dumai dalam menguatkan peran koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kota Dumai dalam menghadapi masyarakat ekonomi Asean adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Dumai setiap tahunnya aktif melakukan kegiatan pembinaan dan pengawan terhadap Koperasi di Kota Dumai.
2. Pemerintah Kota Dumai melakukan kegiatan evaluasi terhadap keragaan koperasi di Kota Dumai.
3. Pemerintah Kota Dumai melakukan kegiatan pelatihan pengurus koperasi di Kota Dumai.
4. Pemerintah Kota Dumai melakukan kegiatan pemantapan kelembagaan koperasi di Kota Dumai.
5. Pemerintah Kota Dumai juga melakukan pengembangan usaha kecil menengah yang berbasis ekonomi kreatif di Kota Dumai.

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, maka terkait penguatan peran koperasi dan usaha kecil menengah dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean diperlukan beberapa saran berikut ini, yaitu:

1. Diperlukan adanya kesadaran dan peningkatan pengetahuan dari pengurus koperasi di Kota Dumai dalam pengelolaan koperasi.
2. Diperlukan adanya dukungan dari seluruh pihak atau elemen masyarakat di Kota Dumai untuk siap bersaing dalam era masyarakat ekonomi Asean.
3. Perlunya peningkatan kegiatan sosialisasi terkait Masyarakat Ekonomi Asean di masyarakat Kota Dumai terutama dikalangan masyarakat di wilayah pedalaman.



DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Bahri Nurdin, 1999. *Partisipasi Anggota dan Pemantapan Skala Usaha Sebagai Alat Penunjang Pelaksanaan Koperasi Mandiri*, dalam "Ekonomi Indonesia Masalah dan Prospek 1989/1990", Jakarta: UII Press.

Ray dalam Asnawi Hasan, 1997. *Koperasi dalam Pandangan Islam, Suatu Tinjauan dari Segi Falsafah Etik, dalam Membangun Sistem Ekonomi Nasional, Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta: UI Press.

Buku

Harold D. Laswell, 1971, *A Preview of Policy Sciences*, American Elsevier, New York.

M. Firdaus dan Agus Edhi Susanto, 2002. *Perkoperasian: Sejarah, Teori dan Praktek*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Andji Anoraga dan Ninik Widiyanti, 1997. *Dinamika Koperasi*, Cet. Kedua. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

K.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, 2005. *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Rian Nugroho, 2003, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi*, Elekmedia Komputindo: Jakarta.

A.A Wahab, 1997, *Analisa Kebijakan Negara dari Formulasi ke Impelentasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara: Jakarta.

Samodra Wibawa, 1994, *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*, Intermedia: Jakarta.

Gunngono, Bambang, 1994, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, Jakarta : Sinar Grafika.

Uriawikarta, Bay, 1997, *Pengertian Policy dan Policy Analysis*, Diktat Kuliah "Analisis Kebijakan Publik", Bandung : PPS Unpad – LAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau

Thomas R. Dye, 1978, *Understanding Public Policy*, Prentice Hall, Inc. Englewood Cliffs, NJ.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pengembangan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 18 Tahun 1998, tentang peningkatan pembinaan dan pengembangan perkoperasian.

Peraturan Walikota Dumai Nomor 24 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Kota Dumai.

Laporan

Dinas Koperasi UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai. 2015. *Laporan Tahunan Dinas Koperasi UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai*. Pemerintah Kota Dumai.

